

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan pada penelitian ini. Ada dua rujukan sebagai berikut:

1. Sari Surya, 2011

Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari Surya (2011) yang berjudul “Analisis Kinerja Dana Bergulir PNPM Mandiri Di Kecamatan Lubuk Begalung Di Kota Padang” Permasalahan yang dibahas oleh Sari Surya yaitu : program pengentasan kemiskinan melalui penyaluran dana bergulir merupakan bentuk pemberian pinjaman jangka pendek kepada pemilik usaha mikro dan kecil anggota KSM. Diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja usaha sehingga dapat menghasilkan manfaat kepada pemiliknya.

Dari penelitian Sari Surya dapat disimpulkan sebagai berikut : Dari hasil analisis penilaian kinerja dana bergulir ini akan terlihat dari perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah mendapat bantuan dana bergulir. Penggunaan rasio keuangan ini diharapkan dapat menjadi salah satu indikator kinerja PNPM Mandiri dalam pengentasan kemiskinan. Sejauh mana hal ini berlaku pada program dana bergulir yang disalurkan di kota Padang masih menjadi pertanyaan dan perlu dipelajari lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan menginvestasikan apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan dan sosial ekonomi usaha mikro dan kecil anggota KSM yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang sebelum dan setelah mendapat dana bantuan dana bergulir dari PNPM Mandiri Perkotaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan sebagaimana adanya (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009), untuk mengungkapkan fakta mengenai kinerja dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan pada KSM di Kecamatan Lubuk Begalung Padang. Data yang digunakan adalah kinerja keuangan dan indikator sosial ekonomi usaha mikro kecil dan keluarganya pada waktu tertentu.

2. Rida Rahim, 2008

Penelitian terdahulu yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Rida Rahim pada Tahun 2008 dengan topik penelitian mengenai “Evaluasi Analisa Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada bank Umum Syariah dan Unit Syariah (Studi Kasus BSM dan BNI Syariah)” Peneliti ini menjelaskan bagaimana pengaruh CAR terhadap profitabilitas (ROE), bagaimana pengaruh FDR terhadap profitabilitas (ROE), bagaimana pengaruh BOPO (Rasio Biaya Operasional) terhadap profitabilitas (ROE), bagaimana pengaruh NPL terhadap profitabilitas (ROE), dan bagaimana pengaruh CAR, FDR, BOPO dan NPL terhadap profitabilitas (ROE) secara bersama-sama pada Bank Syariah (Bank Umum Syariah dan Unit Syariah).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Sensus. Data yang digunakan adalah data primer. Selanjutnya untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Analisis Regresi Linier Berganda yang terdiri dari uji serempak (uji F) dan uji parsial (uji t). Kesimpulan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil perhitungan besarnya koefisien adjusted R-square pada BSM sebesar 0,622 dan BNI sebesar 0.753 yang berarti bahwa variabel-variabel independen (CAR, FDR, BOPO, NPL) dalam penelitian ini secara bersama-sama/simultan mampu memberikan kontribusi terhadap variabel dependen (ROE) adalah 62,2% dan 75,3%, sedangkan sisanya pada BSM sebesar 37,8% dan BNI sebesar 24,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
- b. Dari pengujian F statistik dengan menggunakan $\alpha = 5\%$ diperoleh F-tabel sebesar 4,77 sementara diperoleh F-statistik pada BSM sebesar 8.801 dan BNI memperoleh F-statistik sebesar 15.485 yang berarti kedua bank tersebut memiliki F-statistik $>$ F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.
- c. Pada bank umum syariah yang diwakili oleh Bank Syariah Mandiri berdasarkan hasil uji parsial pada bank BSM bahwa variabel CAR, BOPO dan NPL berpengaruh signifikan terhadap ROE. Sedangkan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE. Hal ini terjadi karena bank BSM masih mengalami kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan sedangkan

dana pihak ketiga sangat besar. Variabel CAR berpengaruh negative terhadap variabel ROE karena adanya pembiayaan musyarakah sebesar 55,12% dengan tingkat resiko 30-70%.

Pada bank unit syariah yang diwakili oleh BNI berdasarkan hasil uji partial pada BNI bahwa variabel CAR, FDR, BOPO, dan NPL berpengaruh signifikan terhadap variabel ROE. Variabel CAR berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan variabel FDR, BOPO dan NPL berpengaruh negative terhadap profitabilitas.

Tabel 2.1
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU
DENGAN PENELITIAN SEKARANG

Aspek	Penelitian Terdahulu I	Penelitian Terdahulu II	Penelitian Sekarang
Peneliti	Sari Surya	Rida Rahim	Wangsa Dwiwiryana
Judul	Analisis Kinerja Dana Bergulir PNPB Mandiri di Kecamatan Lubuk Begalung di Kota Padang	Analisa Efisiensi Operasional terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah dan Unit syariah	Pengaruh LAR, NPL, Rata-rata Pinjaman, Kualitas UPK, dan Fasilitator Lapangan Terhadap BOPO Pada PNPB Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo
Variabel Bebas	Analisis rasio likuiditas dan profitabilitas	Efisiensi Operasional (CAR, FDR, BOPO dan NPL)	LAR, NPL, Rata-rata Pinjaman, Kualitas UPK dan Fasilitator Lapangan
Variabel Tergantung	Usaha Mikro dan Kecil	Profitabilitas (ROE)	BOPO pada PNPB Mandiri Perdesaan
Populasi	Kinerja Dana Bergulir PNPB Mandiri	Bank Umum Syariah dan Unit Syariah (Studi kasus BSM dan BNI Syariah)	Rasio Keuangan Perbankan melalui PNPB Mandiri Perdesaan
Periode Penelitian	2011	2008	2013
Teknik Sampling	Purposive Sampling	Sensus	Sensus
Jenis Data	Primer	Primer	Primer
Teknik Analisis Data	Analisis Wicoxon signed-rank test	Regresi Linier Berganda	Regresi Linier Berganda

Sumber: Sari Surya 2011 dan Rida Rahim 2008

2.2 Landasan Teori

Pada landasan teori ini akan dibahas beberapa teori yang berkaitan dengan penelitian ini yang berhubungan permasalahan yang nantinya akan diteliti dan akan digunakan sebagai acuan penyusunan hipotesis serta analisisnya.

2.2.1 Pengelolaan Dana Bergulir

Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi RTM untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan SPP. Dengan tujuan pelestarian dana bergulir baik SPP dan UEP yang berasal dari PPK agar sesuai dengan prinsip, tujuan dan mekanisme.

Dana bergulir adalah seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yang disalurkan melalui kelompok-kelompok masyarakat.

2.2.1.1 Tujuan Dana Bergulir

Kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan bertujuan:

1. Memberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha;
2. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program;

3. Peningkatan kapasitas pengelolaan kegiatan dana bergulir di tingkat wilayah pedesaan;
4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel, transparan dan berkelanjutan;
5. Peningkatan pelayanan kepada RTM dalam pemenuhan kebutuhan permodalan usaha melalui kelompok pemanfaat.

2.2.1.2 Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan-tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana bergulir mulai perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Akses dana bergulir mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses dana BLM hal ini di dasari oleh beberapa kondisi diantaranya: sifat kepemilikan dana oleh masyarakat, model kompetisi antar kelompok peminjam bukan antar kegiatan, kelembagaan yang terlibat dengan mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dan UPK, kebutuhan pola perguliran yang sesuai. Perbedaan karakteristik tersebut tidak diperbolehkan bertentangan dengan tujuan, prinsip, ketentuan dasar program, sehingga dibutuhkan mekanisme yang sesuai.

2.2.2 Kelembagaan UPK

- a. UPK merupakan pengelola dana bergulir yang berasal dari program (PPK, PNPM-PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan) dengan mekanisme

sesuai dengan ketentuan BKAD atau MAD yang mengacu pada tujuan dan prinsip program.

- b. Pengurus UPK adalah masyarakat yang telah dipilih dan terlibat secara langsung bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional sehari-hari. Paling tidak pengurus UPK satu orang. Struktur organisasi dan kebutuhan jumlah pengurus dapat disesuaikan dengan kebutuhan cakupan wilayah tugas dan kebutuhan beban tugas.
- c. Dalam pengelolaan dana bergulir UPK, didukung oleh lembaga pendukung paling tidak oleh Tim Verifikasi dan Badan Pengawas – UPK BKAD. Pendanaan operasional bersifat pendanaan dukungan tugas bukan bersifat insentif yang tetap setiap bulan.
- d. Perencanaan pendapatan bukan perencanaan alokasi (pembagian porsi pendapatan) tetapi perhitungan perkiraan pendapatan dalam satu tahun sehingga tidak diperbolehkan dilakukan pembagian alokasi pendapatan sebelum diperhitungkan seluruh biaya dan resiko.

2.2.3 Pengertian Program Nasional Perberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong

prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi tujuan umum dari PNPM mandiri adalah tujuan umum dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri, mempercepat penanggulangan kemiskinan serta meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat desa yang ditempuh melalui pemberan modal usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif dan membangun saran dan prasarana yang mendukung pembangunan di pedesaan.

Sedangkan tujuan khususnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan.

2.2.4 Prinsip Pokok PNPM Mandiri Perdesaan

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Perdesaan menekankan prinsip-prinsip pokok SiKOMPAK, yang terdiri dari:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif
2. **Desentralisasi.** Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya
3. **Keberpihakan pada Orang/ Masyarakat Miskin.** Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung
4. **Otonomi.** Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola
5. **Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat.** Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan
6. **Prioritas Usulan.** Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas

7. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut
8. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan
9. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2.2.5 Lembaga Keuangan Mikro

Dalam Lincoln Arsyad, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis.

Lembaga Keuangan Mikro berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif yang dilakukan usaha mikro, maupun untuk kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin. Sebagai lembaga simpanan, Lembaga Keuangan Mikro dapat menghimpun dana yang dijadikan prasyarat bagi adanya kredit walaupun pada akhirnya sering kali jumlah kredit yang diberikan lebih besar dari dana yang berhasil dihimpun.

2.2.6 Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Dalam pelaksanaannya PNPM-M Perdesaan beberapa program selain program Infrastruktur perdesaan juga mempunyai program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Dana Bergulir yang bertujuan untuk membangkitkan ekonomi keluarga sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selanjutnya di salurkan kepada komunitas masyarakat melalui kelompok-kelompok perempuan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-Mandiri Perdesaan

Sebagaimana yang tertuang dalam PTO PNPM Mandiri Perdesaan disebutkan bahwa grand design yang menjadi visi utama program pemberdayaan tersebut adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin di pedesaan- dengan asumsi bahwa kesejahteraan diartikan ketika terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan kemandirian diasumsikan sebagai kemampuan mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya dan salah satu misi yang terkait langsung dengan sektor kesejahteraan masyarakat desa adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya serta peningkatan kualitas sarana prasarana sosial dasar utamanya ekonomi masyarakat melalui jaringan kemitraan yang mengedepankan kesetaraan.

2.2.7 Kinerja Keuangan

2.2.7.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambar setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk

menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.

2.2.7.2 Efisiensi

Analisis ratio efisiensi operasional menurut Lukman Dendawijaya (2009:111). Biaya Operasional adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan lembaga keuangan mikro, yaitu biaya bunga, biaya, biaya tenaga kerja, penyusutan dan biaya lainnya. Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha mikro yang benar-benar diterima, seperti hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan.

1. Beban Operasional Pendapatan Operasi (BOPO)

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:119) “rasio biaya operasional adalah perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Rasio BOPO sering disebut rasio efisiensi digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.

Rumus perhitungan BOPO:

$$BOPO = \frac{\text{Total Biaya Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100 \% \dots \dots \dots (1)$$

2.2.7.3 Rasio Likuiditas

Menurut Harahap (2009:301), rasio likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan PNPM Mandiri memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk

dapat memenuhi kewajibannya yang sewaktu-waktu ini, maka PNPM Mandiri harus mempunyai alat-alat untuk membayar yang berupa aset-aset lancar yang jumlahnya harus jauh lebih besar dari pada kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar berupa kewajiban-kewajiban lancar.

1. Loan to Asset Ratio (LAR)

Menurut Lukman Dendawijaya (2009:117) LAR, digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Semakin tinggi LAR maka semakin kecil tingkat likuiditasnya.

$$LAR = \frac{\text{Jumlah Kredit yang diberikan}}{\text{Jumlah Assets}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

2.2.7.4 Kualitas Aktiva

Kualitas aktiva suatu bank ditentukan oleh kemungkinan menguangkan kembali kolektibilitas aktiva, semakin kecil kemungkinan menguangkan kembali aktiva akan semakin rendah kualitas aktiva yang bersangkutan. Lukman Denda Wijaya (2009:66).

1. Non Performing Loan (NPL)

Merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan PNPM Mandiri dalam mengelola kredit bermasalah dari keseluruhan yang diberikan oleh PNPM Mandiri. Semakin tinggi rasio ini semakin jelek kualitas kredit yang bersangkutan karena jumlah kredit bermasalah semakin besar dan juga menyebabkan pada kredit bermasalah sehingga memerlukan penyediaan modal

yang cukup besar sehingga pendapatan menjadi menurun dan laba juga akan mengalami penurunan. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga. Kredit bermasalah merupakan kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, macet. Besarnya rasio NPL dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Jumlah KSM Menunggak > 3 bulan} \times 100\%}{\text{Jumlah KSM Peminjam}} \dots\dots\dots(3)$$

2. Rata – Rata Pinjaman

Rata-rata Pinjaman dalam PNPM Mandiri UPK dalam program PNPM yang menangani Simpan Pinjam bagi masyarakat di wilayah kami. Tugas kami adalah memberikan pinjaman uang (secara bergulir) kepada masyarakat kurang mampu yang ingin membuka usaha (ekonomi). Besarnya rata-rata pinjaman ini dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rata-rata Pinjaman} = \frac{\text{Total Saldo Pinjaman}}{\text{Total Desa di Kecamatan}} \times \dots\dots\dots(4)$$

3. Kualitas UPK

Penilaian yang dimaksud adalah melakukan evaluasi kondisi UPK dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pengelolaan dana bergulir, hal ini perlu dilakukan dengan alasan bahwa UPK tidak disiapkan secara khusus untuk mengelola keuangan secara umum tetapi hanya mengelola keuangan yang berkaitan dengan program.

$$\text{Kualitas UPK} = \frac{\text{Total Tunggakan diatas 6 Bulan}}{\text{Total Saldo Pinjaman}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

2.2.7.5 Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Sekelompok orang yang bersepakat untuk saling membantu dan bekerja sama membangun sumber pelayanan keuangan guna mendorong dan mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan taraf hidup para anggota dan keluarganya jumlah KSM dapat dilihat melalui persentase apabila persentase 100% dapat dikatakan memuaskan, apabila kurang dari 70% dapat dikatakan tidak memuaskan.

1. Fasilitator Lapangan

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator Kecamatan dalam kaitannya dengan penguatan kelompok, penguatan kelembagaan dan penguatan kegiatan/usaha. Kegiatan fasilitasi dapat dilakukan baik secara langsung (misalnya: menghubungkan pembeli produk yang dihasilkan, memberikan pelatihan administrasi, dan sebagainya) maupun tidak langsung (memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan penguatan kelompok misalnya: memberikan informasi lembaga pelatihan yang berhubungan dengan usaha atau memberikan informasi penyedia modal, dan sebagainya).

2.2.8 Pengaruh LAR, NPL, Rata-Rata Pinjaman, Kualitas UPK dan Fasilitator Lapangan Terhadap BOPO

1. Pengaruh LAR dengan BOPO

LAR memiliki pengaruh negatif terhadap BOPO, hal ini terjadi apabila LAR meningkat berarti jumlah kredit yang diberikan melebihi dari total asset yang dimiliki perusahaan. Akibatnya pendapatan operasional BOPO menurun sedangkan biaya operasional PNPM Mandiri Perdesaan meningkat sehingga BOPO juga meningkat.

2. Pengaruh NPL dengan BOPO

NPL memiliki pengaruh positif terhadap BOPO, hal ini terjadi apabila NPL jumlah KSM menunggak > 3 bulan NPL semakin tinggi juga pendapatan operasional yang diperoleh BOPO, sedangkan dihadapi oleh BOPO, total pendapatan . Jadi NPL berpengaruh positif terhadap BOPO.

3. Pengaruh Rata-rata Pinjaman dengan BOPO

Rata-rata pinjaman memiliki pengaruh positif terhadap BOPO, karena semakin tinggi peminjam pendapatan meningkat karena ini berfokus pada dana permodalan awal perusahaan dengan pinjaman bergulir. Jadi Rata-rata pinjaman berpengaruh positif terhadap BOPO.

4. Pengaruh Kualitas UPK dengan BOPO

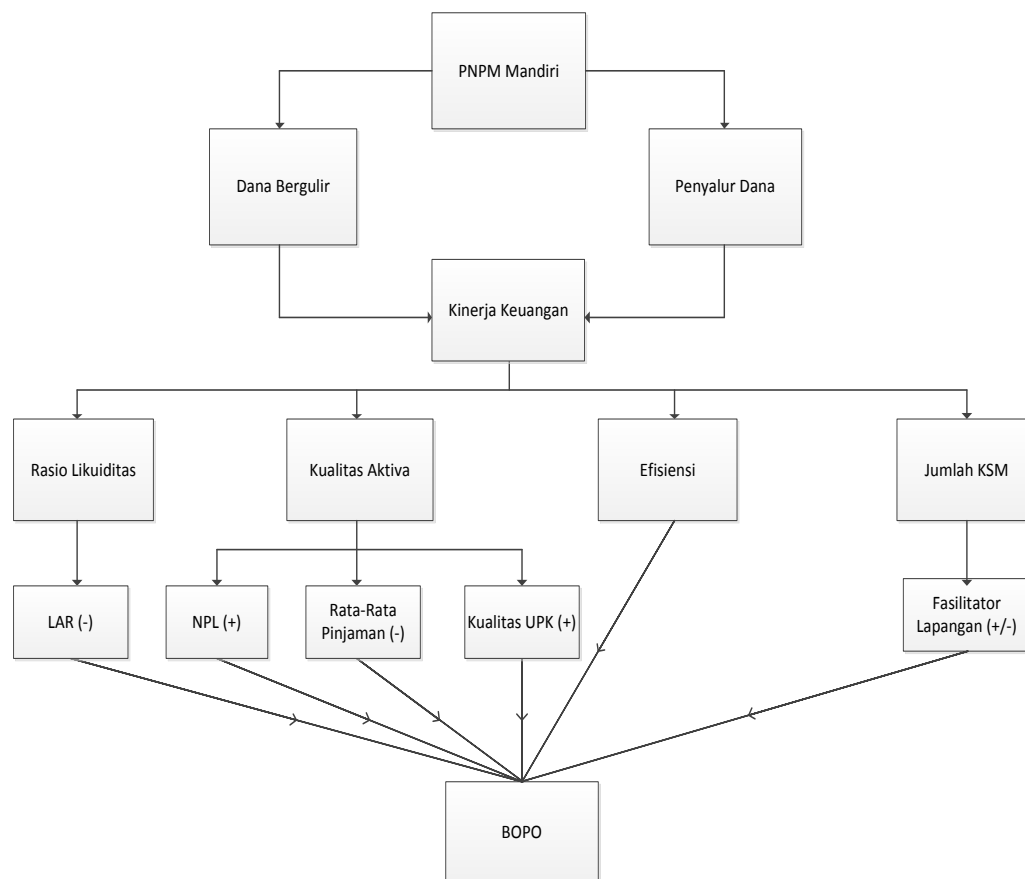
Kualitas UPK memiliki pengaruh positif terhadap BOPO, karena semakin tinggi saldo peminjam di masyarakat masih ada potensi produktivitas saldo pinjaman yang tertunggak maksimal enam bulan ditambah dengan jumlah dana bergulir, ini dapat menambah total pendapatan terhadap BOPO. Jadi Kualitas UPK berpengaruh positif terhadap BOPO.

5. Pengaruh Fasilitator Lapangan dengan BOPO

Fasilitator lapangan memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap peningkatan pendapatan lembaga keuangan mikro terutama PNPM Mandiri Perdesaan, karena semakin dikelola dengan baik berpengaruh positif sedangkan bila fasilitator tidak mengelola dengan baik akan berpengaruh BOPO meningkat yaitu total biayanya. Jadi fasilitator lapangan berpengaruh positif atau negatif terhadap BOPO.

2.3 Kerangka Pemikiran

Hubungan semuanya diatas dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dapat tinjauan pustaka seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat beberapa hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

1. Rasio *Loan to Assets Ratio (LAR)*, *Non Performing Loan (NPL)*, Rata-rata Pinjaman, Kualitas UPK dan Fasilitator Lapangan secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.

2. Rasio *Loan to Asset Ratio (LAR)*, secara individu memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.
3. Rasio *Non Performing Loan (NPL)*, secara individu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.
4. Rasio Rata-rata Pinjaman, secara individu memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.
5. Rasio Kualitas UPK, secara individu memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.
6. Rasio Fasilitator Lapangan, secara individu memiliki pengaruh positif/negatif yang signifikan terhadap BOPO pada PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sidoarjo.